



## Sukses Kelola Anggaran dengan Baik

# Sintang Diganjar WTP

SINTANG. Pemerintah Kabupaten Sintang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, atas pengelolaan keuangan tahun 2012. Hasil pemeriksaan keuangan itu, diterima Bupati Sintang, Drs Milton Crosby, MSi dan Ketua DPRD Sintang Harjono, SSos, MSi.

Penyerahan dilakukan langsung Kepala BPK Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo, di Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar, Selasa (11/6). Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo menjelaskan, pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan ini untuk memenuhi amanat Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Laporan Hasil Pemeriksaan ini merupakan rapor dari pengelolaan keuangan daerah.

"Selama kami memeriksa ada temuan pada sistem pengendalian dan ketidakpatuhan pada aturan. Untuk Kabupaten Sintang kami memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan sampai saat ini hanya Kota Pontianak dan Kabupaten Sintang saja yang sudah mendapatkan WTP," jelas Adi Sudibyo.

Namun predikat tersebut bukan sebuah 'hadiah', melainkan hasil dari kerja keras Pemkab dan DPRD Sintang dalam mengelola dan mengawasi penggunaan keuangan negara. BPK Kalbar mengharapkan Pemkab Sintang mampu mempertahankan predikat yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan negara tersebut pada tahun-tahun berikutnya. "Biasanya mempertahankan predikat ini sulit. Maka kami berpesan peranan inspektorat harus diperkuat. Kunci untuk mendapatkan predikat WTP adalah komitmen kepala daerah dan DPRD," tambah Adi Sudibyo.



Kepala BPK Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo menyerahkan predikat WTP kepada Bupati Sintang Milton Crosby. SUHARDIN

Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby MSi, bangga atas keberhasilan dalam meraih predikat WTP. Karena tidak semua daerah bisa menyandang predikat tersebut. Menurut Milton, berkat pengawasan secara berkesinambungan, termasuk dengan dukungan DPRD Kabupaten Sintang, pihaknya mampu meraih predikat WTP.

"Kami juga berterima kepada seluruh kepala dinas, badan, kantor, camat, dan lurah yang telah bekerja keras. Pada tahun 2006, kami disclaimer, tahun 2007 sampai 2011 hanya mendapatkan WDP dan pelaksanaan tahun anggaran 2012 bisa mendapatkan WTP," kata Milton yang didaulat memberikan sambutan mewakili kepala daerah yang hadir saat itu.

Dijelaskan Milton, ada lima faktor supaya nilai rapor bagus yakni pertama, komitmen yang kuat dalam melaksanakan reformasi birokrasi, kedua disiplin dan kerja keras SKPD, ketiga kekompakan, kebersamaan serta kerjasama antara Pemkab Sintang dan DPRD, keempat dukungan dari masyarakat, kelima bimbingan

intensif dan konstruktif BPK dan BPKP. "Untuk meraih predikat WTP ini kita selalu melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh jajaran SKPD, termasuk dengan bantuan dan dukungan DPRD Kabupaten Sintang," kata Milton.

Dalam setiap pertemuan dengan SKPD, lanjut Milton, pihaknya selalu mengingatkan untuk memanfaatkan anggaran dengan benar agar tepat sasaran dan tidak sampai menimbulkan masalah dengan unsur penegak hukum.

"Kepada SKPD selalu diingatkan untuk tidak macam-macam. Kerja yang lurus saja bisa dianggap salah, apalagi macam-macam," ucapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Harjono, mengatakan keterlibatan pihaknya dalam pengawasan penggunaan keuangan negara tersebut. Karena bagian dari penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Meski demikian, pihaknya lebih mengutamakan komunikasi agar penggunaan keuan-

gan negara yang dilaksanakan aparat pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat. Tanggung jawab pengawasan kami intensifkan dengan komunikasi," kata politisi Partai Golkar itu.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. sedangkan istilah Wajar dimaksudkan bahwa Laporan Keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting meliputi pengungkapan yang tercantum dalam Laporan Keuangan. (din)